

**PECAHNYA PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI) MENJADI  
PARTAI INDONESIA (PARTINDO) DAN  
PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA (PNI-BARU)**

**SKRIPSI**



Oleh

No. Indok: 991799.7228.185

Uraian	Hasil	Penelitian	KLAS
			929-3
		18 APR 1999	WAH
			P

*Emy Wahyuningrum*

NIM. 9402105032

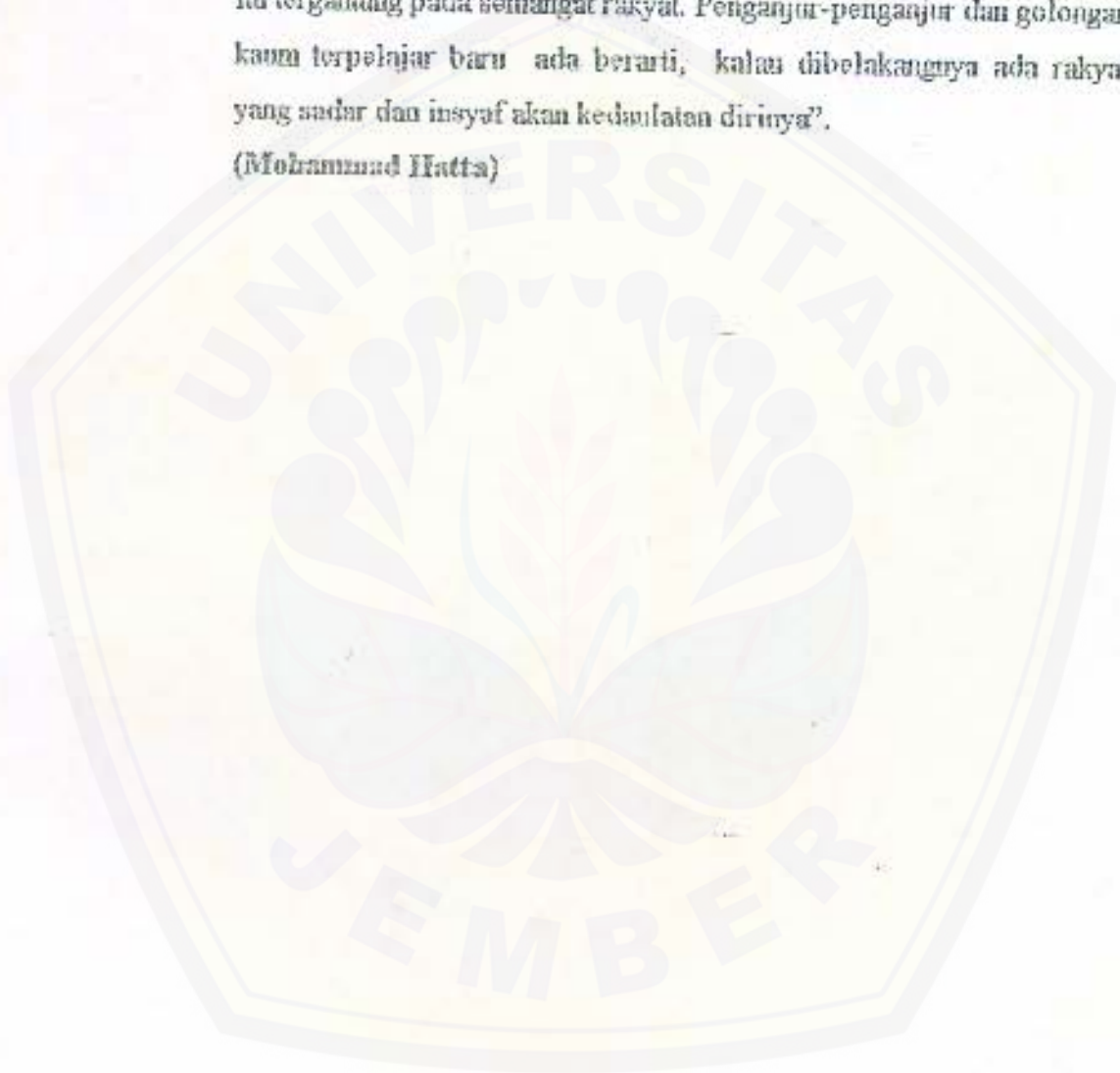
**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER**

**MARET 1999**

MOTTO

“Rakyat itu yang utama. Hidup atau matinya Indonesia merdeka, semua itu tergantung pada semangat rakyat. Penganjur-penganjur dan golongan kaum terpelajar baru ada berarti, kalau dibelakangnya ada rakyat yang sadar dan insyaf akan kedaulatan dirinya”.

(Mohammad Hatta)



Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Ayah dan Ibuku tersayang, yang telah berusaha dan berdoa untukku dalam menuntut ilmu dan cita-cita
2. Saudara-saudaraku tercinta, yang senantiasa berdoa untuk keberhasitanku
3. Guru-guruku yang selalu kuhormati
4. Almamater yang selalu kubanggakan.



PECAHNYA PARTAI NASIONAL INDONESIA (PNI) MENJADI PARTAI INDONESIA  
(PARTINDO) DAN PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA (PNI-BARU)

SKRIPSI

Diajukan untuk dipertahankan di depan tim penguji guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan spesialisasi Program Pendidikan Sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember

Oleh:

Nama Mahasiswa : EMY WAHYUNINGRUM  
NIM : 9402105032  
Angkatan Tahun : 1994  
Daerah Asal : Surakarta  
Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 14 April 1974  
Jurusan/Program : Pendidikan IPS/Pendidikan Sejarah

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

  
H. CHOESNOEL HADI S.PD

NIP. 130 145 576

Pembimbing II

  
DRS. SUMARNO

NIP. 131 403 352

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan diterima oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember sebagai skripsi.

Pada hari : Sabtu

Tanggal : 27 Maret 1999

Tempat : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember

Tim Penguji:

  
Kulua,  
DRS SUMARNO

NIP. 131 403 352

Sekretaris

  
DRA NURUL UMAMAH

NIP. 132 052 408

Anggota:

1. H. CHOESNOEL HADI S.PD

\_\_\_\_\_

NIP. 130 145 352

2. DRA. SRI HANDAYANI

\_\_\_\_\_

NIP. 131 472 786



Mengetahui

Dekan,

  
DRS. SOEKARJJO BW

NIP. 130 287 101

## KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan ke hadirat Allah swt, atas limpahan taufik, rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul Pecahnya Partai Nasional Indonesia (PNI) Menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) ini dengan sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Jember
2. Kepala UPT Perpustakaan-UNEJ
3. Dekan dan para Pembantu Dekan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas Jember
4. Ketua Jurusan Pendidikan IPS FKIP-UNEJ
5. Ketua Program Pendidikan Sejarah-FKIP-UNEJ
6. Dosen Pembimbing I dan Pembimbing II
7. Seluruh dosen FKIP-UNEJ, khususnya dosen yang mengajar di Program Pendidikan Sejarah
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa hasil penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik. Penulis berharap semoga penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu sejarah. Amien!

Jember, 27 Maret 1999

Penulis

## RINGKASAN

Emy Wahyuningrum, NIM 9402105032, jurusan Pendidikan IPS, Program Pendidikan Sejarah FKIP-UNEJ

Skripsi : Pecahnya Partai Nasional Indonesia (PNI) Menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru).

Pembimbing; (I) H.Choesnoel Hadi, S.Pd  
(II) Drs. Sumarno

Kata Kunci: Pecahnya PNI; Partindo; PNI-Baru

Pecahnya PNI menjadi Partindo dan PNI-Baru pada tahun 1931 sangat menarik untuk diteliti, sebab peristiwa sejarah itu bila diuraikan secara jelas akan dapat memberi pelajaran bagi generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pecahnya Partai Nasional Indonesia(PNI) menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) ? .

Penelitian ini bertujuan ingin mengungkapkan secara jelas dan mendalam mengenai, sebab, proses dan akibat Pecahnya Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru).

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:(1) bagi penulis dapat melatih diri dalam penelitian ini dan mendapat pengalaman dalam rangka mengembangkan ilmu serta memperluas wawasan pengetahuan, (2) bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat menambah wawasan pengetahuan dalam mempelajari ilmu sejarah (3) bagi generasi muda penerus perjuangan bangsa dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bahwa pecahnya PNI dapat mengakibatkan pecahnya perjuangan, karena itu perlu generasi yang sekarang memahammi betapa pentingnya rasa persatuan demi tercapainya perjuangan bangsa Indonesia

Metode pengumpulan data pada bulan April 1998 sampai Januari 1999 dengan studi literatur, sehingga tempat penelitian yang digunakan adalah perpustakaan.

Metode penelitian adalah metode sejarah dengan langkah-langkah heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Metode penentuan tempat penelitian, dan tempat penelitian yang digunakan adalah metode purposive sampling. Perpustakaan yang digunakan sebagai tempat penelitian adalah UPT Perpustakaan - UNEJ. Perpustakaan Fakultas Sastra-UNEJ, dan Laboratorium Program Pendidikan Sejarah FKIP-UNEJ.

Metode pengumpulan data dokumenter, sedangkan metode analisis data (pembahasan permasalahan) adalah metode filosofik dengan teknik logika induktif dan logika komparatif.

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa Pecahnya Partai Nasional Indonesia (PNI) Menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) adalah (1) perbedaan cara memperjuangkan ideologi para tokoh-tokohnya pada awal berdirinya PNI, dan (2) perbedaan pendapat antara Sartono dengan Hatta-Syahrir setelah dibubarkannya PNI.

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut: (1) bagi mahasiswa calon guru sejarah, agar lebih mendalami dan menguasai materi sejarah, khususnya materi tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia sebagai bekal seorang guru sejarah, sebab penguasaan materi termasuk salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai, dan hal tersebut akan sangat menunjang keberhasilan mengajar. (2) bagi generasi muda, yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa, hendaknya lebih giat mempelajari sejarah perjuangan bangsa sehingga dapat bertindak lebih bijaksana dalam meneruskan perjuangan selanjutnya, (3) bagi almamater, hendaknya lebih meningkatkan perbendaharaan buku-buku literatur dalam perpustakaan, khususnya buku-buku tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia sehingga mahasiswa dan para dosen tidak kesulitan dalam mencari sumber-sumber sejarah, agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian sejarah.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan.....
	1
	1.2 Defenisi Operasional Variabel.....
	4
	1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan.....
	6
	1.4 Tujuan Penelitian.....
	7
	1.5 Manfaat Penelitian.....
	7
BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN
	2.1 Sejarah Berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI).....
	9
	2.2 Sebab-Sebab Pecahnya Partai Nasional Indonesia (PNI) Menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI- Baru).....
	12
	2.3 Proses Pecahnya PNI Menjadi Partindo dan PNI-Baru.....
	14
	2.4 Akibat Pecahnya PNI Menjadi Partindo dan PNI-Baru.....
	16
BAB III	METODE PENELITIAN
	3.1 Pengertian Metode Penelitian.....
	18
	3.2 Pengertian Metode Penelitian Sejarah.....
	19
	3.3.1 Heuristik.....
	20

	3.3.2 Kritik.....	20
	3.3.3 Interpretasi.....	21
	3.3.4 Historiografi.....	21
	3.3. Metode Penentuan Tempat Penelitian.....	22
	3.4. Metode Pengumpulan Data.....	23
	3.5. Metode Analisis Data.....	24
BAB IV	PEMBAHASAN	
	4.1. Sejarah Berdirinya PNI.....	27
	4.2. Sebab-Sebab Pecahnya PNI Menjadi Partindo dan PNI-Baru.....	32
	4.2.1 Perbedaan Cara Memperjuangkan Ideologi Para Tokoh Tokohnya Pada Awal Berdirinya PNI.....	32
	4.2.2 Perbedaan Pendapat Antara Sartono dengan Hatta-Syahrir Setelah Dibubarkannya PNI.....	34
	4.3. Proses Pecahnya PNI Menjadi Partindo dan PNI-Baru.....	35
	4.4. Akibat Pecahnya PNI.....	37
	4.4.1 Partindo.....	37
	4.4.2 PNI-Baru.....	39
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN	
	5.1. Kesimpulan.....	42
	5.2. Saran-Saran.....	43
	KEPUSTAKAAN	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
	1. Matrik Penelitian	
	2. Surat Keterangan Studi Literatur dari Kepala UPT Perpustakaan-Universitas Jember	
	3. Surat Keterangan Studi Literatur dari Penanggung jawab Koleksi Buku Jurusan Fakultas Sastra- Universitas Jember	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Pemilihan Permasalahan

Organisasi pergerakan nasional Indonesia timbul pada awal abad XX sebagai akibat penjajahan kolonial Belanda, serta dipengaruhi oleh berbagai peristiwa yang mendahuluinya, baik peristiwa yang terjadi di luar negeri maupun di dalam negeri. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar negeri, seperti kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 yang oleh bangsa Asia dipandang sebagai kemenangan Timur atas Eropa, sehingga mampu menyemangati bangsa-bangsa Timur lainnya, termasuk Indonesia; perjuangan Turki Muda di bawah pimpinan Mustafa Kemal Pasja, yaitu suatu gerakan untuk mencapai perbaikan nasib, pernyataan Woodrow Wilson, Presiden Amerika Serikat yang mendengungkan Wilson's Fourteen Points dalam Piagam PBB, terutama tentang the right of self determination (hak menentukan nasib sendiri tiap bangsa), telah mempercepat proses timbulnya pergerakan nasional Indonesia (M.Hutasruk, 1984: 14-15). Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam, misalnya adanya kebijaksanaan Politik Etis yang dijalankan Pemerintahan Hindia Belanda sejak akhir abad XIX telah menimbulkan dampak yang luas dalam bidang pendidikan. Dengan bernaung di bawah Politik Etis, Pemerintahan Hindia Belanda perlahan-lahan memperluas kesempatan bagi anak-anak Indonesia dari golongan atas untuk mengikuti sekolah-sekolah berbahasa Belanda pada tingkat dasar dan menengah. Sampai akhir Perang Dunia I kebijaksanaan dalam bidang pendidikan ini telah menghasilkan beberapa lulusan yang makin lama meningkat jumlahnya (John Ingleson, 1983:1).

Para mahasiswa yang ada di negara Belanda memiliki kesadaran politik yang cukup tinggi. Banyak diantara mereka yang telah aktif dalam organisasi pemuda sewaktu masih berada di Indonesia, sehingga tidak mengherankan setelah berada di Belanda mereka terus terlibat dalam pergerakan nasional dan bergabung dalam organisasi Perhimpunan Indonesia (John Ingleson, 1983: 2). Kalangan pergerakan nasional di

Indonesia sendiri nampaknya berangsur-angsur berhasil dipengaruhi oleh organisasi Perhimpunan Indonesia. Bahkan ada kejadian penting yang timbul di tanah air yang secara langsung mendapat ilham dari perjuangan organisasi Perhimpunan Indonesia, yaitu berdirinya Studie Club (Kelompok Belajar) dan Partai Nasional Indonesia (PNI). Kelompok Belajar tersebut berada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan lain-lain (Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993: 189).

Lahirnya Partai Nasional Indonesia (PNI) dilatarbelakangi oleh situasi sosial politik yang kompleks, dimana pemberontakan PKI tahun 1926 telah membangkitkan semangat baru di kalangan kaum terpelajar untuk menyusun kekuatan baru guna menghadapi kolonialisme Belanda. Pembubaran PKI dan pelarangan kegiatan politik yang makin keras dilakukan oleh Pemerintah Hindia Belanda, justru tidak mengendorkan semangat kehidupan politik di kalangan kaum terpelajar. Tindakan Pemerintah Hindia Belanda telah memberi dorongan untuk mengubah Kelompok Studi Umum (Algemene Studie Club) di Bandung menjadi partai politik yang berhaluan tegas (Slamet Mulyono, 1986: 15).

Partai Nasional Indonesia (PNI) didirikan oleh Ir. Soekarno dan kawan-kawannya pada tahun 1927. PNI adalah aktualisasi dari ideologi nasionalisme sekuler dalam pergerakan politik Indonesia. Soekarno seorang gifted leader, banyak belajar dari pengalaman-pengalaman dan kelemahan-kelemahan Serikat Islam (SI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dia segera muncul dengan penemuan strategi perjuangan baru. Strategi itu ialah, bahwa ketiga ideologi politik, Islam, marxisme dan nasionalisme harus bersatu. Hanya dengan persatuan inilah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan akan berhasil (M. Rusli Karim, 1983: VII). PNI adalah partai non kooperasi. Tujuannya adalah kemerdekaan. Partai ini cepat mendapat dukungan rakyat. Tetapi PNI sebagai benteng nasionalisme sekuler tidak hidup lama. Timbul pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) tahun 1926 dan sikap non kooperasi PNI yang dianggap oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai tindakan radikal, diantaranya berakibat pada akhir tahun 1929 Soekarno dan beberapa tokoh PNI ditangkap dan dihukum. Dengan dipelopori oleh Mr. Sartono,

PNI yang baru berumur beberapa tahun dibubarkan pada tahun 1931. Dengan pembubaran ini mengundang perpecahan yang pertama di kalangan pendukung ideologi nasionalisme sekuler. Pihak yang pro pembubaran mendirikan Partai Indonesia (Partindo) dengan pimpinan Sartono, sedang yang menentang mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) di bawah pimpinan Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir (M. Rusli Karim, 1983: IX).

Dalam praktiknya Partindo dan PNI-Baru ini selalu berbentah dalam paham politik, antara lain mengenai soal swadesi yang dianjurkan Mr. Sartono yang mendapat tantangan baru Drs. Mohammad Hatta. Partindo dengan suratkabarnya Persatuan Indonesia selalu berperang pena dengan PNI-Baru melalui suratkabarnya Kedaulatan Rakyat (AH. Nasution, 1977: 58). Perbedaan antara keduanya sebenarnya tidak ada hubungan dengan persoalan pembaharuan sosial. Mereka setuju bahwa kemerdekaan politik adalah tujuan utama yang harus dicapai dengan taktik non kooperasi. Tetapi apabila PNI-Baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosial, maka Partindo percaya bahwa organisasi massa dengan aksi massa adalah senjata yang tepat untuk mencapai kemerdekaan (Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto., 1993: 271).

Jadi jelas, bahwa pecahnya PNI menjadi Partindo dan PNI-Baru ini disebabkan diantaranya adalah ketidaksepahaman pemimpin-pemimpin PNI. Sekitar sebab-sebab ini sangat menarik untuk ditelaah lebih mendalam. Itulah sebabnya penulis memilih permasalahan ini untuk diteliti, dan dirumuskan dalam kalimat judul "Pecahnya Partai Nasional Indonesia (PNI) Menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru)". Sebagai bahan pertimbangan, yaitu: (1) topik masih dalam jangkauan peneliti, (2) literatur-literatur yang diperlukan sebagai sumber data tidak banyak mengalami kesulitan untuk didapat, (3) topik cukup penting untuk diteliti sehingga dapat melengkapi karya sejarah khususnya yang berhubungan dengan masalah sejarah pergerakan nasional Indonesia, (4) topik belum pernah diteliti oleh mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya Program Pendidikan Sejarah di lingkungan Universitas Jember, (5) kesediaan dari dosen pembimbing untuk membimbing penulis

dalam penelitian ini serta adanya fasilitas yang menunjang seperti tempat untuk mengadakan penelitian, waktu dan biaya yang mencukupi juga menjadi alasan yang dominan.

## 1.2 Definisi Operasional Variabel

Guna menghindari perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya penulis kemukakan variabel penelitian ini, yaitu: (1) Pecahnya PNI, (2) Partai Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia, Kedua variabel ini perlu dijelaskan berdasar pengertiannya secara lebih jelas dan mendalam.

### 1.2.1 Pecahnya PNI

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pecah adalah: (1) terbelah menjadi beberapa bagian, (2) bercerai-cerai (tidak bersatu atau tidak kompak lagi) (1991: 738).

Partai Nasional Indonesia adalah suatu partai politik baru yang didirikan tanggal 4 Juli 1927 sebagai penjelmaan dari *Algemene Studie Club Soekarno* di Bandung (Susanto Tirtoprodjo, 1980: 77). Menurut John Ingleson, Partai Nasional Indonesia merupakan suatu partai yang bersaing dengan partai-partai lain untuk merebut pengaruh dalam gerakan nasional di Indonesia dan PNI dalam sejarah gerakan kebangsaan Indonesia adalah partai yang tidak membedakan kelas, agama, ras, atau kewarganegaraan (1993: 61-66). Sedangkan menurut M.Rusli Karim, PNI adalah partai yang didirikan oleh Soekarno dan kawan-kawan, termasuk kaum abangan. Partai ini menganut ajaran marxisme yang diperkenalkan Soekarno sebagai asas utamanya.

Setelah Soekarno ditangkap, PNI menghentikan semua kegiatannya. Pada bulan April 1931 para pengurusnya membubarkan PNI. Pihak yang pro pembubaran mendirikan Partai Indonesia (Partindo) dengan pimpinan Sartono, sedang yang menentang mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) di bawah pimpinan Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.



membimbing penulis dalam penelitian ini serta adanya fasilitas yang menunjang seperti tempat untuk mengadakan penelitian, waktu dan biaya yang mencukupi juga menjadi alasan yang dominan.

## 1.2 Definisi Operasional Variabel

Guna menghindari perbedaan penafsiran terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya penulis kemukakan variabel penelitian ini, yaitu: (1) Pecahnya PNI, (2) Partai Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia, Kedua variabel ini perlu dijelaskan pengertiannya secara lebih jelas dan mendalam.

### 1.2.1 Pecahnya PNI

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pecah adalah: (1) terbelah menjadi beberapa bagian, (2) bercerai-cerai (tidak bersatu atau tidak kompak lagi) (WJS.Poerwadarminta,1991: 738).

Partai Nasional Indonesia adalah suatu partai politik yang didirikan tanggal 4 Juli 1927 sebagai penjelmaan dari Algemene Studie Club Soekarno di Bandung (Susanto Tirtoprodjo, 1980: 77). Menurut John Ingleson, Partai Nasional Indonesia merupakan suatu partai yang bersaing dengan partai-partai lain untuk merebut pengaruh dalam gerakan nasional di Indonesia dan PNI dalam sejarah gerakan kebangsaan Indonesia adalah partai yang tidak membedakan klas, agama, ras, atau kewarganegaraan (1993: 61-66). Sedangkan menurut M.Rusli Karim, PNI adalah partai yang didirikan oleh Soekarno dan kawan-kawan, termasuk kaum abangan. Partai ini menganut ajaran marxisme yang diperkenalkan Soekarno sebagai asas utamanya.

Setelah Soekarno ditangkap, PNI menghentikan semua kegiatannya. Pada bulan April 1931 para pengurusnya membubarkan PNI. Pihak yang pro pembubaran mendirikan Partai Indonesia (Partindo) dengan pimpinan Sartono, sedang yang menentang mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) di bawah pimpinan Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan Pecahnya PNI adalah terbelah atau bercerai-cerainya Partai Nasional Indonesia menjadi dua golongan yaitu Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru).

### 1.2.2 Partai Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia

Partai Indonesia disingkat Partindo adalah partai politik yang berdiri segera setelah PNI membubarkan diri pada April 1931 (A.G.Pringgodigdo, 1977: 790). Partindo adalah partai sekuler non kooperasi dan radikal. Sartono dipercaya untuk memimpin partai ini. Pada hakekatnya Partindo adalah PNI dengan nama lain. Partindo tidak seperti pada masa kejayaan PNI, ia lebih menekankan swadaya, swadesi dan koperasi dibidang ekonomi (Suhartono, 1994: 72). Menurut M.Rusli Karim, Partindo adalah partai yang didirikan 30 April 1931 dengan tujuan Indonesia Merdeka. Partai ini merupakan partai baru untuk menghimpun kekuatan yang tadinya berada dalam Partai Nasional Indonesia (1983: 41).

Pendidikan Nasional Indonesia adalah perhimpunan yang didirikan di Yogyakarta pada akhir Desember 1931, atas anjuran Sutan Syahrir, oleh anggota-anggota PNI-Lama yaitu Perserikatan Golongan Merdeka, yang semua bergabung dalam Club Pendidikan Nasional Indonesia (Hasan Shadily, 1984: 68). Menurut Susanto Tirtoprodjo, Pendidikan Nasional Indonesia adalah partai baru di bawah pimpinan Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir yang tidak setuju dengan pembubaran PNI (1980: 79).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka yang dimaksud dengan Partai Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia adalah suatu partai politik yang berdiri sebagai akibat dari perpecahan di dalam tubuh PNI setelah PNI membubarkan diri pada bulan April 1931.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan Pecahnya Partai Nasional Indonesia (PNI) Menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) dalam judul penelitian ini, adalah terbelah



atau bercerai-cerainya Partai Nasional Indonesia menjadi Partai Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu suatu partai politik yang berdiri sebagai akibat dari perpecahan di dalam tubuh PNI setelah PNI membubarkan diri pada bulan April 1931.

### 1.3 Ruang Lingkup dan Rumusan Permasalahan

#### 1.3.1 Ruang Lingkup

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus permasalahan yang akan dibahas, maka penulis merasa perlu untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Koentjaraningrat (Red) yang mengatakan , bahwa kalau masalah sudah terpilih, perlu ditentukan ruang lingkungnya, hal ini penting sekali agar peneliti tidak terjerumus dalam sekian banyak data yang ingin diteliti (1991: 17).

Berdasarkan pendapat di atas, maka penelitian ini mengambil ruang lingkup waktu atau temporal dalam kurun waktu tahun 1927 sampai tahun 1931. Tahun 1927 dijadikan batas awal penelitian, karena pada tahun 1927 PNI berdiri dan organisasi perjuangan kebangsaan memasuki periode radikal. Sedangkan pada tahun 1931 terjadi perpecahan di dalam tubuh PNI itu sendiri.

Perlu penulis tegaskan, bahwa ruang lingkup waktu atau temporal tersebut tidak bersifat mengikat tetapi bersifat fleksibel, maksudnya dalam hal-hal tertentu penulis masi mengkaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelum tahun 1927 dan sesudah tahun 1931.

Mengenai ruang lingkup tempat penelitian ini adalah di Jawa yang merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya Partai Nasional Indonesia. Di samping itu juga di seluruh Indonesia yang menjadi tempat organisasi Partai Nasional Indonesia mempropagandakan tujuannya dalam usaha memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini akan memfokuskan pada masalah-masalah sebab - sebab pecahnya Partai Nasional Indonesia menjadi Partai Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia, proses serta akibat perpecahan tersebut..

### 1.3.2 Rumusan Permasalahan

Permasalahan menurut Mohamad Ali adalah segala bentuk pertanyaan yang perlu untuk dicari jawabannya atau segala hambatan, rintangan atau kesulitan yang muncul pada suatu bidang yang perlu dihindari atau disingkirkan (1989: 47). Sedangkan menurut Winarno Surakhmad, permasalahan adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk mencari pemecahannya (1990: 33). Pada hakekatnya permasalahan timbul karena, suatu kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, sehingga perlu untuk dicari / diteliti sebab-sebab, keadaan sebenarnya yang terjadi, dan akibat-akibatnya.

Berdasarkan latar belakang dan ruang lingkup di atas, maka penulis rumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu bagaimanakah perpecahan PNI menjadi Partindo dan PNI-Baru?

Untuk memecahkan permasalahan tersebut, tidak dikemukakan hipotesis penelitian secara eksplisit, sebab: (1) penelitian ini bersifat deskriptif, sehingga hanya sekedar memaparkan jawaban permasalahan apa adanya, (2) menurut Winarno Surakhmad, dalam penelitian yang bersifat deskriptif, peneliti tidak harus mengajukan hipotesis secara eksplisit (1990: 129), (3) sesungguhnya jawaban terhadap permasalahan ini sudah tersedia di dalam buku-buku yang penulis gunakan sebagai sumber acuan penulis sekedar mengambil dan mengumpulkannya dari buku-buku tersebut, (4) bila suatu penelitian menggunakan hipotesis secara eksplisit, konsekuensinya hipotesis tersebut harus dibahas/ diuji (di bab IV), sedangkan dalam penelitian ini penulis tidak melakukan.

### 1.4 Tujuan Penelitian

Berpijak pada perumusan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah ingin mengungkapkan secara jelas dan mendalam mengenai sebab-sebab, proses, akibat pecahnya Partai Nasional Indonesia menjadi Partai Indonesia dan Pendidikan Nasional Indonesia.

### 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. bagi penulis, dapat melatih diri dalam melakukan penelitian dan mendapat pengalaman dalam rangka pengembangan ilmu serta memperluas wawasan pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan pecahnya Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru);
2. bagi mahasiswa calon guru sejarah, dapat menambah wawasan pengetahuan dalam mempelajari ilmu sejarah, khususnya sejarah pergerakan nasional Indonesia;
3. bagi generasi muda penerus perjuangan bangsa, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman bawah dengan pecahnya PNI mengakibatkan pecahnya perjuangan, karena itu perlu generasi yang sekarang memahami betapa pentingnya rasa persatuan demi tercapainya perjuangan bangsa Indonesia;
4. bagi almamater. merupakan salah satu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu dharna penelitian, selanjutnya penelitian ini akan menambah khasanah kepustakaan di Universitas Jember, khususnya tentang ilmu sejarah.

## BAB II

### TINJAUAN KEPUSTAKAAN

#### 2.1 Sejarah Berdirinya Partai Nasional Indonesia (PNI)

Lahirnya Partai Nasional Indonesia (PNI) dilatarbelakangi oleh situasi sosial politik yang kompleks, pemberontakan PKI tahun 1926 terhadap Pemerintah Kolonial telah membangkitkan semangat baru di kalangan kaum terpelajar untuk menyusun kekuatan baru guna menghadapi kolonialisme Belanda. Pembubaran PKI dan pelarangan kegiatan politik yang makin keras dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda, justru tidak mengendorkan semangat kehidupan politik di kalangan kaum terpelajar. Tindakan pemerintah Hindia Belanda dianggap sebagai tantangan kaum nasionalis yang ingin memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pulangnya beberapa mahasiswa dari negara Belanda telah memberi dorongan untuk mengubah Kelompok Studi Umum (Algemene Studie Club) di Bandung menjadi partai politik yang berhaluan tegas, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juli 1927 (Slamet Mulyono, 1986: 15).

Mohammad Hatta yang mempunyai pemikiran tajam dalam masalah politik mempunyai keinginan untuk menyatukan partai-partai politik di Indonesia dengan tujuan utama untuk mencapai kemerdekaan, dan keyakinannya bahwa nasionalisme radikal tidak perlu takut kepada komunis Indonesia, tetapi justru dapat menyalurkan semangat revolusioner untuk mendukung kegiatan mereka sendiri. Kegagalan pemberontakan PKI bagi Mohammad Hatta merupakan katalisator untuk menyelesaikan rencananya membentuk partai baru di Indonesia, seperti yang selama ini dicita-citakannya. Dalam suratnya kepada Sudjadi, Mohammad Hatta memuji upaya Sudjadi dan menambahkan bahwa beberapa waktu sebelumnya, Iskaq menyatakan keinginannya untuk mengubah Kelompok Studi Umum menjadi organisasi yang setaraf dengan Perhimpunan Indonesia. Mohammad Hatta berjanji untuk membantu mendorong semua anggota Perhimpunan Indonesia untuk masuk organisasi baru tersebut jika pulang ke Indonesia dan mendesak Sudjadi untuk bekerjasama dengan Iskaq dalam masalah ini. Oleh Mohammad Hatta kemudian diusulkan



agar partai yang baru itu diberi nama *Indonesische Nationalistische Volkspartij* (Partai Rakyat Nasionalis Indonesia). Usulan tersebut disampaikan kepada dewan pengurus organisasi Perhimpunan Indonesia dan pada tanggal 23 Nopember 1926 usulan tersebut diterima sebagai garis kebijaksanaan organisasi Perhimpunan Indonesia. Anggaran dasarnya meliputi program politik, sosial dan ekonomi yang luas dan juga mendesak untuk diselenggarakannya kongres nasional pada pertengahan tahun 1927 untuk mengumumkan partai tersebut secara resmi (John Ingleson, 1993: 57).

Persiapan untuk membentuk suatu partai nasionalis baru yang tidak berdasarkan Islam dan Komunis, sejauh ini adalah inisiatif organisasi Perhimpunan Indonesia dan dalam prakteknya sebagian besar menurut gagasan dan rencana Hatta. Mohammad Hatta yakin, bahwa partai baru itu akan diorganisasikan oleh alumni Perhimpunan Indonesia, berdasarkan ideologi Perhimpunan Indonesia dan tepat sesuai dengan rencananya, dan bahwa ia akan mengendalikan kegiatannya dari negeri Belanda, menunjukkan bahwa Hatta kurang mengetahui secara terinci tentang situasi politik di Indonesia. Ia juga terlambat menyadari bahwa pada waktu yang bersamaan dengan hampir terwujudnya persiapan Perhimpunan Indonesia untuk membentuk suatu partai baru itu, sejak paro kedua tahun 1926 di Indonesia sendiri ada gerakan kearah kesatuan nasional dan menuju pencarian arah baru bagi arus utama dalam gerakan kebangsaan. Pencarian basis baru untuk gerakan kebangsaan yang dipusatkan dalam Kelompok Studi di Surabaya dan Bandung itu segera memperoleh waktu yang tepat. Pada awal 1927, setelah rencana pembentukan Sarekat Rakyat Nasional Indonesia (SRNI) diumumkan pada bulan Juli 1927, inisiatif untuk membentuk partai baru berpindah dari tangan Hatta di Bandung yang bergabung dalam Kelompok Studi Umum (John Ingleson, 1993: 64-65).

Walaupun hampir semua pemimpin Kelompok Studi Umum itu alumni Perhimpunan Indonesia, kecuali Soekarno dan Anuwari, kenyataannya mereka lebih memahami situasi di Indonesia daripada pengurus organisasi Perhimpunan Indonesia untuk membentuk partai baru itu menyakinkan kepada SRNI dan mengambil inisiatif lain. Sudjadi segera menyampaikan kepada Mohammad Hatta, bahwa rencana Mohammad

Hatta diterima dengan dingin di Bandung dan Batavia. Dalam suratnya kepada Mohammad Hatta, Sudjadi mengatakan, bahwa:

"program partai tersebut tidak sesuai dengan keinginan para pendukung anda. lebih-lebih lagi, ini jelas bertentangan dengan apa yang ditegaskan dalam Indonesia Merdeka dan dengan kritik dari Dr.Sutomo. Tentu saja, semangat non kooperasi. Program anda juga tidak sesuai dengan keinginan rakyat" (John Ingleson. 1983: 32).

Sejak semula telah disadari, bahwa organisasi baru itu memerlukan basis dan dalam hal ini *studieclub-studieclub* yang ada merupakan dasar yang kuat. Dalam proses pendekatan selanjutnya segera tampak perbedaan titik pendirian, antara lain mengenai prinsip non kooperasi dan pemilihan umum, pendidikan kader, dan basis massa. Pada umumnya para pemuka *studieclub* beranggapan, bahwa rencana Perhimpunan Indonesia tidak sesuai dengan situasi di Indonesia dan oleh karenanya mereka berusaha sendiri membentuk organisasi politik lain. Setelah beberapa kali mengadakan pertemuan dan pembicaraan dalam bulan Maret, April, dan Mei 1927, antara lain dihadiri oleh Soekarno, Iskaq, Budiarto, Tjipto Mangunkusumo, Tilaar, Soedjadi, Soemarjo, akhirnya diputuskan untuk mendirikan Partai Nasional Indonesia pada rapat yang diadakan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, ini disingkat PNI (Sartono Kartodirdjo, 1993, 156).

Tujuan PNI yaitu mencapai Indonesia Merdeka, asas politiknya sama dengan asas politik organisasi Perhimpunan Indonesia, yaitu *self help and non medicancy* (berdiri sendiri dan tidak minta-minta), serta sikapnya terhadap pemerintah Hindia Belanda adalah anti kolonialisme dan non kooperasi. PNI mempunyai dasar dalam perjuangannya, yaitu *marhaenisme* atau *sosio nasionalisme* dan *sosio demokrasi*. Menurut Soekarno, *marhaenisme* adalah suatu ideologi kerakyatan yang mencita-citakan terbentuknya masyarakat sejahtera secara merata. Adapun yang dimaksud dengan *sosio nasionalisme* adalah nasionalisme yang berperikemanusiaan atau dapat dikatakan perasaan cinta kepada sesama manusia. Sedangkan *sosio demokrasi* ialah demokrasi yang menuju kesejahteraan sosial, kesejahteraan seluruh bangsa (G. Moedjanto, 1993: 49).

Sebagai badan eksekutif telah ditunjuk Soekarno sebagai ketua, Iskaq sebagai sekretaris dan bendahara, Samsi sebagai komisaris. Untuk mengerahkan anggotanya telah ditentukan bahwa bekas anggota PKI tidak diperkenankan menjadi anggota, begitu juga pegawai negeri yang mungkin akan menjadi mata-mata Belanda (Sartono Kartodirdjo, 1993: 157).

Setelah setelah berdirinya PNI, pada tahun 1928 diadakan kongres pertama di Surabaya. Dalam Kongres tersebut nama Perserikatan Nasional Indonesia diubah menjadi Partai Nasional Indonesia, dengan singkatan tetap PNI. Maksud dari perubahan ini adalah untuk lebih mempertegas sifat pergerakan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia pada umumnya (Susanto tirtoprodjo, 1980: 78).

## 2.2 Sebab-Sebab Pecahnya Partai Nasional Indonesia (PNI) Menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru).

Dengan program-programnya dan diperkuat dengan propaganda-propaganda dimana selalu berbicara Ir. Soekarno, maka dalam waktu yang singkat PNI telah meluas dengan pesatnya sehingga Gubernur Jenderal dalam pidato pembukaan Volkrsaad tanggal 15 Mei 1928 memandang perlu memberikan peringatan kepada pemimpin-pemimpin PNI supaya menahan diri dalam ucapannya, propagandanya, dan sebagainya. Ternyata peringatan ini tidak dihirankan oleh pemimpin-pemimpin PNI, sehingga Pemerintah Hindia Belanda memandang perlu memberikan peringatan yang kedua dalam bulan Juli 1929. Pada akhir tahun 1929 tersiar kabar yang bersifat provokasi, yang mendesas-desuskan bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada awal tahun 1930. Maka berdasarkan berita provokasi ini tanggal 24 Desember 1929 Pemerintah Hindia Belanda mengadakan penggeledahan dan menangkap empat pimpinan PNI, ialah Ir. Soekarno, Maskun, Gatot Mangkuprodjo dan Supriadinata (Susanto Tirtoprodjo, 1980: 77).

Penangkapan terhadap tokoh-tokoh PNI pada akhir bulan Desember 1929 itu membawa dampak luas dan mendalam dikalangan kaum pergerakan nasional. Dalam masa menunggu peradilan itu, di arena politik terjadi pergolakan yang penuh perselisihan antara

pemimpin-pemimpin, kelompok-kelompok, serta aliran-aliran (Sartono Kartodirdjo, 1993: 165).

Pada awal Januari 1930 ketika sudah jelas, bahwa mereka yang ditangkap itu akan ditahan untuk beberapa waktu, Sartono dan Anwari mengambil alih pimpinan Pengurus Pusat PNI. Pada tanggal 9 Januari 1930 yaitu hanya sehari sebelum Kiewet de Jonge menjelaskan pada Volksraad tentang alasan-alasan campur tangan pemerintah, Sartono dan Anwari mengeluarkan suatu perintah kepada pengurus-pengurus cabang dan para anggotanya agar menghentikan semua kegiatan politik atas nama partai sampai ada ketentuan lebih lanjut. Pernyataan Sartono ini menimbulkan keresahan dikalangan PNI yang kemudian memancing kritik tajam dari Hatta. Pernyataan Sartono ini merupakan rangkaian pertama dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh Sartono tahun 1930-1931 yang menjadi katalisator bagi perpecahan dalam lingkungan PNI selanjutnya (John Ingleson, 1983: 132).

Setelah Soekarno ditangkap, PNI menghentikan hampir semua kegiatannya, dan setelah para pemimpin PNI itu dijatuhi hukuman penjara, maka pada bulan April 1931 pengurusnya membubarkan PNI. Sebagai gantinya mereka membentuk Partai Indonesia (Partindo) yang semua keinginan atau tujuannya sama dengan keinginan dan tujuan PNI yang lama yaitu Indonesia Merdeka (John Ingleson, 1993: 100).

Reaksi yang timbul setelah dibubarkannya PNI berasal dari Hatta yang menyatakan kesedihannya kepada para pemimpin yang begitu mudah tunduk pada sikap permusuhan pemerintah. Ia tidak akan mendukung Partindo karena ia tidak setuju dengan pembubaran PNI, lebih-lebih pembubaran itu tanpa sepengetahuan anggotanya. Ia juga tidak setuju penggabungan PNI dengan Kelompok Studi di Indonesia, karena kerja keras mereka selama tiga tahun itu menjadi sia-sia dan hanya ditundukkan oleh hakim kelas kambing. Oleh karena itu sudah sewajarnya jika dibentuk kaum proletar intelektual, pemuda radikal dari pemuda Indonesia. Baginya yang perlu adalah anggota partai yang berkualitas meskipun jumlahnya sedikit, jadi ia menekankan keanggotaan yang sadar politik akan lebih baik daripada sekedar jumlah anggota yang besar (Suhartono, 1994: 72).



Sebegitu jauh perpecahan pendapat tentang arah dan kepemimpinan PNI sejak Desember 1928 masih terbatas pada kelompok-kelompok kecil bekas anggota PNI yang kemudian bersatu untuk saling membantu dan mencari beberapa alternatif untuk Partindo. Kemudian, terutama oleh golongan yang pembubarannya PNI, yang dipelopori oleh Sudjadi dan sesuai dengan ketendak Mohammad Hatta, maka didirikanlah Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) (A.H.Nasution, 1977: 58).

Pada dasarnya sebelum persiapan membentuk PNI-Baru, Hatta mempunyai gagasan dan rencana bahwa partai baru itu akan diorganisasikan oleh alumni Perhimpunan Indonesia (PI), berdasarkan ideologi Perhimpunan Indonesia. Namun program partai tersebut tidak sesuai dengan keinginan para pendukung, karena Hatta sendiri kurang mengetahui secara terinci tentang situasi politik di Indonesia. Partai yang diusulkan tersebut harus memainkan peranan penting di bidang pendidikan, dan melalui pendidikan rakyat akan secara bertahap disiapkan untuk merdeka. Di sinilah benih perselisihan tentang taktik dan gaya perjuangan yang kemudian menyebabkan Hatta sejak tahun 1929 secara terang-terangan mengkritik PNI dan bubarnya PNI pada tahun 1931, menyebabkan terbentuknya suatu partai saingan yang sekuler dan non kooperasi (John Ingleson, 1993: 68).

### 2.3 Proses Pecahnya PNI Menjadi Partindo dan PNI-Baru

Pada masa Soekarno meringkuk di penjara Sukamiskin Bandung, beberapa pihak mencoba mengatasi situasi dengan pelbagai jalan yang sudah barang tentu cocok dengan cita-cita serta keinginan masing-masing. Mengingat keanekaragaman haluan dan strategi politik, maka jalan yang bermacam-macam itu menciptakan situasi politik yang sangat kompleks. Ketegangan dan konflik terjadi bertubi-tubi, suatu proses yang hanya membuat perpecahan menjadi tambah parah. Apakah skenario yang penuh konflik itu memang telah dibayangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda yang lazim digambarkan terampil dalam menjalankan politik *divide et impera*, hal ini tidak diketahui. Yang jelas ialah bahwa motif penangkapan para pemimpin ialah untuk mencegah terulangnya luru-luru tahun 1926.

sekaligus memperlemah kedudukan PNI dan rupanya sama sekali tidak memupus organisasi nasionalnya (Sartono Kartodirdjo, 1993: 167).

Hukuman terhadap pemimpin PNI juga mengandung pengertian, bahwa barang siapa melakukan tindakan seperti para pemimpin itu dapat dituduh melakukan kejahatan dan dapat dijatuhi hukuman (pasal 153 dan 169 KUHP). Jadi anggota - anggota yang masih meneruskan jejak dan langkah PNI ada dalam bahaya. Oleh karena itu atas pertimbangan ini khususnya dari segi keselamatan, maka pengurus besar PNI memutuskan pembubaran PNI. Sartono segera menyelenggarakan kongres luar biasa untuk membahas pendirian partai baru dipihak lain. Partai baru itu adalah partai sekuler dan non kooperasi, bernama Partai Indonesia atau Partindo pada tanggal 1 Mei 1931 dan Sartono dipercaya untuk memimpin partai itu (Suhartono, 1994: 71-72).

Pembubaran PNI dan seruan Partindo untuk memperoleh dukungan dari bekas-bekas anggota PNI mengundang tantangan hebat dari beberapa kalangan dalam PNI. Keputusan Sartono untuk melarang kegiatan politik PNI lebih lanjut sesudah adanya campur tangan pemerintah telah menimbulkan amarah dari banyak anggota-anggota cabang. Kejangkelan mereka terhadap pengurus pusat, khususnya terhadap Sartono, mencapai puncaknya sepanjang tahun 1930, dan kemudian semakin menjadi-jadi karena desas-desus tentang peleburan PNI dengan Kelompok Studi di Indonesia dan karena kritik Hatta dari negeri Belanda. Orang-orang itu terutama adalah orang-orang yang mendapat pendidikan di Indonesia, pegawai-pegawai pemerintah tingkat bawah, guru-guru serta juru tulis, yang telah mengalami kebangkitan politik dan tertarik untuk memasuki PNI pada pertengahan kedua tahun 1929 karena pidato-pidato Soekarno. Harapan-harapan mereka yang telah membangkitkan, kini terputuk oleh penangkapan Soekarno yang disusul oleh bungkannya PNI. Reaksi Hatta terhadap pembubaran PNI mula-mula berupa sebuah pernyataan sedih, bahwa para pemimpin telah begitu mudah tunduk kepada sikap permusuhan pemerintah. Hatta menjelaskan, bahwa ia tidak akan mendukung Partindo karena ia tidak setuju dengan pembubaran PNI, dan juga keberatan bahwa pembubaran tersebut telah dilakukan tanpa konsultasi dengan para anggotanya. Menurut pendapatnya, sesudah tiga tahun bekerja

keras membangun organisasi, maka sangatlah keliru membubarkan partai itu dengan mengambil alasan keputusan hukuman oleh pemerintah terhadap empat orang pemimpin partai oleh Dewan Hakim (John Inglesoa, 1983: 162-164).Keadaan yang demikian ini menguntungkan Golongan Merdeka yang rupanya ada di belakang Hatta. Syahrir yang pada waktu itu menjadi anggota pengurus Perhimpunan Indonesia, disamping belajar ilmu hukum di Universitas Amsterdam, ia lebih menekuni aktivitasnya pada organisasi politik mahasiswa dari serikat buruh. Secara intelektual ia juga menginginkan Indonesia Merdeka yang demokratis dan sosialis (Suhartono, 1994: 72). Pada bulan Desember 1931 Syahrir, yang baru pulang dari negeri Belanda, membentuk suatu organisasi tandingan terhadap Partindo. Organisasi ini adalah Pendidikan Nasional Indonesia yang dikarenakan huruf-huruf awalnya disebut PNI-Baru. Di sini taktik-taktik Soekarno ditolak dan PNI-Baru menganti pandangan-pandangan yang sedikit lebih realistik (Ricklefs, M.C, 1995: 287). PNI-Baru ini mempunyai haluan sosial revolusioner, berupaya membentuk massa proletariat yang ditadapkan pada kaum kapitalis dan borjuis. PNI Syahrir menutamakan pendidikan kader, hal mana berbeda dengan Partindo yang merupakan partai massa dan yang mengarahkan kegiatannya dalam penyelenggaraan massa aksi. Perlu dicatat bahwa Mohammad Hatta tidak setuju dengan Partindo. Oleh karenanya pada tanggal 23 Agustus 1932 sewaktu beliau tiba di tanah air, ia menggabungkan diri dengan PNI-Baru (Hardi, 1988: 152 ).

#### 2.4 Akibat Pecahnya PNI Menjadi Partindo dan PNI-Baru

Setelah kongres pembubaran PNI pada tanggal 25 April 1931, dibentuklah suatu panitia untuk mendirikan partai pengganti PNI, sehingga dengan cepat dalam tahun1931 itu juga didirikan Partindo oleh Mr. Sartono dan kawan-kawan di Jakarta. Kemudian, terutama oleh golongan yang anti pembubaran PNI dan dipelopori oleh Sudjadi dan sesuai pula dengan kehendak Drs. Mohammad Hatta dari Nederlang, maka didirikanlah PNI-Baru (A.H.Nagatou, 1977: 57).

Dalam prakteknya Partindo dan PNI-Baru ini selalu berbentah dalam paham politik, antara lain mengenai soal swadesi yang dianjurkan oleh Sartono yang mendapat tantangan dari Mohammad Hatta.

Saat Kongres Indonesia Raya di Surabaya yang digerakan oleh PPPKI, ternyata bertepatan dengan pembebasan Soekarno dari penjara Sukamiskin karena ia mendapat pengampunan dua tahun. Maka Kongres Indonesia Raya menyambut kedatangan Soekarno itu dengan upacara. Dan pada waktu itulah memuncak popularitas Soekarno. Dalam resepsi kongres yang sengaja diselenggarakan untuk menghormatinya, maka ia mengucapkan penyesalannya atas perpecahan diantara kawan-kawan lamanya yakni dalam Partindo dan PNI-Baru. Dalam pidatonya itu ia menyatakan tidak berpihak kepada salah satu keduanya itu, melainkan akan berusaha untuk mempersatukan kembali (A.H. Nasution, 1977: 57). Usaha untuk mempersatukan PNI-Baru dan Partindo sebenarnya sebelumnya diusahakan Maskun dan Marwoto untuk menyelenggarakan rapat-rapat umum bersama antara Partindo dan PNI-Baru untuk mengusahakan persatuan kembali. Hal ini dilakukan beberapa kali di berbagai tempat di daerah Priangan selama lebih kurang dua bulan. Walaupun para pengikut kedua belah pihak datang menghadiri rapat-rapat, namun pendirian mereka tidak bertemu. Akhirnya Soekarno memilih Partindo yang memang bersedia untuk mengembangkan sayapnya dengan caranya; rapat-rapat umum di mana-mana, dan pemimpin berpidato secara berapi-api persis seperti jaman PNI-Lama. Cara ini tidak disetujui Hatta dan Golongan PNI-Baru (Deliar Noor, 1990: ).

Setelah Soekarno masuk Partindo, orang sering menyebut bahwa Partindo adalah partainya Soekarno dan PNI-Baru partainya Hatta dan Syahrir. Rupanya hal ini dapat dibenarkan karena yang mendominasi partai-partai itu adalah Soekarno disitu pihak dan Hatta Syahrir di pihak lain. Soekarno berpendidikan Barat dan ia bukan satu-satunya yang berpengaruh di dalam Partindo tetapi ada pemimpin lain seperti Ali Sastroamijoyo, Sartono, Iskaq, Suyudi dan lain-lain. Hatta dan Syahrir jelas berpendidikan Barat dan penganut sosialisme dan demokrasi (Suhartono, 1994: 83). Dengan demikian, maka pada waktu itu tampaknya ada suatu pembagian tugas, kekuatan politik Partindo di bawah

piimpinan Soekarno menggerakkan untaun aksi, sedangkan kelanjutan politik PNI-Baru di bawah Mohammad Hatta aktif dalam pendidikan kader dengan memfokuskan pandangannya pada bidang ekonomi (Hardi, 1988: 152 ).



## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Pengertian Metode Penelitian

Sebelum mengadakan penelitian diperlukan adanya metode penelitian, agar penelitian dapat dilaksanakan secara sistematis dan efisien. Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang artinya cara atau sampai. Pengertian metode menurut Winarno Surakhmad, merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan (1990, 131). Sedangkan menurut Mardalis, metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian untuk mencapai suatu tujuan (1990; 24). Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa metode adalah suatu cara atau teknik yang dilakukan dalam proses penelitian untuk mencapai suatu tujuan.

Pengertian penelitian yang biasa disebut *research* adalah suatu usaha untuk menemukan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana yang dilakukan dengan metode-metode ilmiah (Sutrisno Hadi, 1989; 4). Lebih lanjut Sutrisno Hadi menjelaskan, bahwa kegiatan penelitian dilakukan sebagai upaya memahami dan memecahkan suatu permasalahan secara ilmiah, sistematis dan logis. Istilah ilmiah mengandung maksud berdasarkan data-data empirik yang diperoleh dari penyelidikan secara hati-hati dan bersifat objektif, sistematis dan logis (1989; 50).

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara menemukan dan menghubungkan faktor-faktor guna menghasilkan dalil atau teori melalui metode ilmiah.

Metode penelitian menurut Winarno Surakhmad diklasifikasikan menjadi tiga golongan yaitu: (1) metode penelitian historik, (2) metode penelitian eksperimental, (3) metode penelitian deskriptif (1990). Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historik (metode penelitian sejarah). Hal ini disebabkan data-data atau fakta-fakta yang diperoleh serta langkah-

langkah yang dilakukan lebih mengarah pada jenis penelitian sejarah. Adapun pengertian metode penelitian sejarah akan diuraikan dibawah ini.

### 3.2 Metode Penelitian Sejarah

Penelitian dapat dilihat dari perspektif serta waktu terjadinya fenomena-fenomena yang diselidiki. Pemakaian metode sejarah dalam penelitian ini sangat tepat karena metode sejarah mempunyai perspektif historis. Terjadinya fenomena-fenomena itu pada masa yang telah lampau. Pengertian metode penelitian sejarah adalah sebagai suatu penelitian yang dilakukan dengan cara atau jalan meninjau suatu masalah dari perspektifsejarah, berdasarkan pada peninggalan atau dokumen yang ada (Mohammad Ali, 1985; 111). Metode penelitian sejarah menurut Moh Nazir ada empat, yaitu: (1) metode sejarah lebih banyak mengandalkan diri pada data yang diamati orang lain pada masa lampau, (2) bobot data harus dikritik baik secara internal maupun eksternal, (3) metode sejarah mencari data secara lebih tuntas serta menggali informasi yang lebih tua yang tidak diterbitkan atau dikutip dalam bahan acuan yang standar, (4) sumber data harus dinyatakan secara definitif, baik nama pengarang, tempat dan waktu serta data tersebut harus diuji kebenarannya dan keasliannya (1985; 56). Louis Gottschalk menerangkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian sejarah adalah suatu proses menguji atau menganalisa secara kritis rekaman peninggalan masa lampau (1972; 32).

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian sejarah adalah aturan-aturan mengenai prosedur kerja penelitian dalam melakukan rekonstruksi imajinatif secara objektif tentang masa lampau berdasarkan jejak-jejak sumber yang ditinggalkan oleh masa lampau itu.

Langkah-langkah dalam keseluruhan prosedur, maka metode penelitian sejarah dibagi atas empat kelompok kegiatan, yaitu: (1) heuristik, (2) kritik, (3) interpretasi, (4) historiografi (Nugroho Netosusanto, 1987; 19). Langkah-langkah dijelaskan di bawah ini

### 3.2.1 Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal dalam penelitian sejarah. Dalam langkah ini kegiatan penelitian adalah menghimpun sumber-sumber masa lampau sesuai permasalahan yang dibahas. Jejak-jejak masa lampau itu disebut pula sumber sejarah. Sumber sejarah yang dihimpun tersebut akan dipakai sebagai bahan untuk menulis sejarah. Dalam metode sejarah menurut G.J Revier, kegiatan heuristik ini menuntut peneliti untuk mencari atau menemukan jejak-jejak sejarah (I.G Widya, 1988; 19). Dalam hal ini berupa buku-buku yang dikarang oleh sejarawan.

Usaha untuk menemukan sumber-sumber sejarah bagi peneliti akan sangat sukar jika tidak mengadakan penggolongan atau pengklasifikasian. Penggolongan yang sederhana, sumber sejarah dibagi atas tiga macam, yakni: (1) sumber benda, (2) sumber tertulis, (3) sumber lisan, (Sartono Kartodirdjo, 1970; 18).

Sumber juga diklasifikasikan menjadi sumber pokok dan penunjang. Sumber pokok adalah sumber yang banyak dipakai atau menjadi acuan pokok dalam memecahkan masalah yang dibahas, sedangkan sumber penunjang adalah sumber tambahan yang menunjang sumber pokok. Sumber sejarah yang dipergunakan dalam penelitian ini masuk dalam penggolongan sumber tertulis berupa buku-buku. Sebagai hasil dari kegiatan heuristik ini, maka sumber-sumber sejarah yang dihimpun adalah berupa sumber pokok dan penunjang yaitu sumber berupa buku-buku yang memuat data-data untuk memecahkan permasalahan yang dirumuskan dalam judul Pecahnya Partai Nasional Indonesia (PNI) Menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru).

### 3.2.2 Kritik

Apabila seorang peneliti telah berhasil mengumpulkan sumber sejarah, maka langkah berikutnya mengkritik sumber, yaitu tahap memilah-milah dan mengkaji sumber-sumber yang telah diperoleh, apakah sumber tersebut benar asli dan dapat dipercaya atau tidak (Winarno Surakhmal, 1990; 134).



Kritik terhadap sumber sejarah dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara ekstern dan intern. Kritik ekstern yaitu kritik yang dilakukan untuk mengetahui apakah sumber itu asli atau tiruan. Sedangkan kritik intern yaitu kritik yang dilakukan dengan menilai hasil-hasil secara instrinsik dari sumber-sumber dengan melihat sifat-sifat sumber dari pengarang dari sumber itu. Kemudian juga dilakukan dengan membanding-bandingkan kesaksian dari berbagai sumber (Nugroho Notosusanto, 1971; 21). Dengan demikian langkah kritik adalah kegiatan menilai atau menyeleksi sumber-sumber atau jejak-jejak sejarah yang benar dalam arti benar-benar diperlukan, benar-benar asli serta benar-benar mengandung informasi yang relevan dengan cerita sejarah yang akan disusun.

### 3.2.3 Interpretasi

Langkah ketiga dari metode sejarah adalah interpretasi atau penafsiran-penafsiran. Interpretasi adalah menetapkan makna dan saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh dari sumber sejarah. Menurut Nugroho Notosusanto, interpretasi diperlukan karena berbagai fakta yang lepas satu sama lain itu harus dirangkai dan dihubungkan dengan dibumbui imajinasi penulis, sehingga menjadi kesatuan yang harmonis dan masuk akal (1971; 23). Hal senada diungkapkan oleh I Gde Widja, bahwa fakta-fakta sejarah yang telah diwujudkan perlu dihubungkan dan dikait-kaitkan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga antara satu fakta dengan fakta lain kelihatan suatu rangkaian yang masuk akal, dalam arti menunjukkan kesesuaian satu sama lainnya (1988; 23). Dengan kata lain rangkaian bermakna dari gejala, peristiwa atau gagasan yang dituliskan di masa lampau dalam arti tersusun secara sistematis, kronologis dan logis.

### 3.2.4 Historiografi

Langkah terakhir dari metode penelitian sejarah adalah kegiatan penulisan sejarah (historiografi). Historiografi adalah penyajian hasil-hasil interpretasi dari analisis terhadap fakta-fakta sejarah ke dalam bentuk kisah sejarah tertulis. Fakta-fakta sejarah yang telah terkumpul secara sistematis menjadi cerita sejarah yang logis. Dengan demikian

historiografi merupakan klimaks dari penelitian sejarah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari metode sejarah, yaitu melukiskan hasil kritik dan interpretasi yang telah disusun secara logis, kronologis dan sistematis menjadi suatu kisah yang selaras (Nugroho Notosusanto, 1971; 82). Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah kegiatan rekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data yang telah diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah (1971; 32).

Untuk melukiskan peristiwa secara kronologis, obyektif sesuai dengan kondisi yang terjadi dalam peristiwa itu, maka imajinasi penulis memegang peranan penting dalam arti menghubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya secara harmonis, sehingga nantinya akan terwujud suatu kisah sejarah ilmiah. Jadi historiografi dengan menggunakan metode diskriptif, adalah berusaha melukiskan peristiwa secara kronologis, logis dan sistematis dengan merangkai fakta-fakta sejarah sebagai hasil penafsiran atau interpretasi atau fakta-fakta tersebut, sehingga nantinya akan terwujud suatu kisah sejarah yang ilmiah.

### 3.3 Metode Penentuan Tempat Penelitian

Penelitian sejarah dapat dibedakan menjadi empat jenis penelitian, yaitu: (1) penelitian sejarah komparatif, (2) penelitian yuridis atau legal, (3) penelitian biografis, (4) penelitian bibliografis (Moh. Nazir, 1985; 61). Dalam penulisan skripsi ini termasuk ke dalam jenis penelitian bibliografis atau dapat juga disebut penelitian kepustakaan (Hadari Nawawi, 1983; 82). Moh Nazir mengartikan penelitian bibliografis adalah suatu penelitian sejarah yang menggunakan metode sejarah untuk mencari, menganalisis, dan membuat interpretasi serta generalisasi dari data-data dalam suatu masalah. Cara kerja penelitian bibliografis ini termasuk menghimpun karya-karya tertentu dari seorang penulis serta memberikan interpretasi atau generalisasi terhadap karya-karya tersebut (1985; 62).

Tempat penelitian bibliografis ini lebih banyak dilakukan di perpustakaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Louis Gottschalk yang mengatakan bahwa laboratorium yang lazim bagi sejarawan adalah perpustakaan (1971; 46). Sedangkan metode yang digunakan dalam

menentukan tempat penelitian adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengertian purposive sampling, yaitu menentukan tempat penelitian berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang diperoleh melalui informasi yang mendahului dan secara intensional hanya mengambil daerah kunci guna mencapai tujuan-tujuan tertentu (Sulisno Hadi, 1986; 62)..

Cara kerja untuk menentukan tempat penelitian ini adalah dengan melihat perpustakaan-perpustakaan yang ada di kotatiff Jember sebagai populasinya. Selanjutnya berdasarkan pertimbangan, bahwa beberapa perpustakaan itu menyediakan sumber-sumber yang mengandung data-data yang dapat untuk memecahkan permasalahan dan dapat membuktikan hipotesis yang penulis ajukan sebelumnya, perpustakaan-perpustakaan tersebut dengan sengaja penulis pilih sebagai tempat penelitian. Perpustakaan-perpustakaan yang sengaja penulis pilih adalah: (1) Perpustakaan Pusat Universitas Jember, (2) Perpustakaan Fakultas Sastra Universitas Jember, (3) Laboratorium Pendidikan Sejarah FKIP-Universitas Jember. Selain menggunakan sumber-sumber yang diperoleh dari perpustakaan-perpustakaan tersebut, penulis juga menggunakan buku-buku koleksi pribadi sebagai sumber data.

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Sesuai dengan langkah-langkah pertama dalam metode penelitian sejarah, yaitu heuristik, maka penulis dalam mengumpulkan data menggunakan sumber tertulis atau buku. Buku-buku termasuk sumber tertulis, termasuk golongan dokumen. Sumber-sumber yang penulis gunakan tidak hanya berupa buku-buku, tetapi juga berupa bahan-bahan tertulis lainnya, seperti: surat kabar, majalah, catatan atau buku harian dan lain sebagainya karena sumber yang penulis gunakan berupa buku-buku yang termasuk dokumen, maka metode dokumen ini disebut metode dokumenter, yaitu metode penelitian yang menggunakan sumber tertulis sebagai sumber datanya (Suharsimi Arikunto, 1989; 131). Sedangkan Mohammad Ali berpendapat, bahwa metode dokumenter adalah metode untuk mencari sumber atau data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, transkrip,

buku, surat kabar dan majalah. Jadi sumber informasi dokumenter pada dasarnya adalah segala macam bentuk sumber informasi yang berhubungan dengan bahan-bahan tertulis (1982; 41-42).

Selain itu, mengingat banyaknya data yang digunakan dan berasal dari berbagai pengarang, maka dalam penelitian ini penulis membagi data-data tersebut menjadi dua kelompok, yaitu sumber pokok dan sumber penunjang. Sumber pokok yaitu apabila buku atau sumber tersebut lebih banyak diambil sebagai bahan tulisan atau acuan pokok. Sebaliknya sumber penunjang digunakan untuk melengkapi atau menunjang sumber pokok.

### 3.5 Metode Analisis Data

Menganalisis data dalam suatu penelitian, khususnya penelitian sejarah selalu berkaitan dengan kegiatan kritik, interpretasi dan historiografi. Proses semacam ini dalam penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan generalisasi atau kesimpulan yang akurat. Sedangkan dalam menganalisis terhadap data historik dalam penelitian ini dengan menggunakan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan logika induktif.

Tugas analisis data adalah mengumpulkan kembali, merangkainya suatu fakta dengan fakta-fakta lain dengan hubungan yang logis, kronologis dan rasional, sehingga akan tersusun suatu kisah sejarah yang obyektif dan rasional. Hadari Nawawi mengemukakan bahwa menganalisis data historik dengan menggunakan metode filosofik, karena metode ini bekerja dengan menggunakan data kualitatif. Lebih lanjut dikatakan bahwa metode filosofik adalah prosedur untuk memecahkan masalah secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang sistematis berdasarkan pola pikir induktif dan lain-lain dengan memperhatikan hukum-hukum berpikir yang logis (1983; 62).

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan metode filosofik adalah suatu cara atau teknik yang dipergunakan oleh peneliti untuk memecahkan permasalahan yang diteliti secara rasional melalui pemikiran yang terarah menurut aturan penalaran yang tepat untuk mencapai suatu kebenaran. Dalam menerapkan metode filosofik ini penulis menggunakan teknik logika komparatif dan teknik logika induktif.

Teknik logika komparatif adalah suatu prosedur pemecahan masalah dengan cara membanding-bandingkan data yang ada. Menurut Mohammad Ali, komparatif adalah teknik membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor atau situasi yang menyebabkan timbulnya suatu peristiwa tertentu (1982; 132). Sedangkan menurut Winarno Surakhmad, teknik komparatif adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan lebih dari satu fenomena sejenis dengan menunjukkan unsur-unsur persamaan dan perbedaan (1990; 143).

Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa teknik logika komparatif adalah suatu cara untuk mencari faktor-faktor penyebab timbulnya suatu peristiwa tertentu dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dari berbagai fenomena, informasi atau data yang timbul untuk mendapatkan fakta dari satu peristiwa sejarah yang bisa dirangkaikan menjadi kisah sejarah yang masuk akal.

Dalam menganalisis data sejarah, teknik komparatif digunakan untuk membanding-bandingkan data yang satu dengan data yang lain untuk mendapatkan fakta sejarah yang bisa dirangkaikan sehingga menjadi suatu kisah sejarah.

Sedangkan teknik logika induktif adalah acara berpikir yang bertolak dari pengetahuan-pengetahuan yang bersifat umum (Hadari Nawawi, 1983; 18). Menurut Sutrisno Hadi, teknik logika induktif adalah cara berpikir yang berdasarkan pada pengetahuan yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit, kemudian dari peristiwa-peristiwa yang konkrit tersebut ditarik kesimpulan yang beranjak dari hal yang bersifat khusus menuju hal yang bersifat umum (1982; 18). Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa teknik logika induktif adalah cara berpikir dengan mendasarkan diri pada fakta-fakta yang bersifat khusus untuk ditarik menjadi suatu konklusi atau kesimpulan yang bersifat umum atau dengan kata lain berpikir induktif merupakan cara berpikir dari sesuatu yang bersifat khusus kepada sesuatu yang bersifat umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan metode filosofik dengan teknik logika komparatif dan logika induktif dalam penelitian ini adalah suatu cara atau

teknik yang digunakan dalam memecahkan suatu permasalahan secara rasional menurut aturan penalaran yang tepat dengan membanding-bandingkan dari berbagai fenomena atau data yang ada (yang bersifat khusus) untuk kemudian ditarik menjadi generalisasi (kesimpulan) yang bersifat umum demi tercapainya suatu kebenaran. Jadi dengan demikian teknik logika induktif dan teknik logika komparatif di sini digunakan secara simultan (bersama-sama).



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Bertitik tolak dari permasalahan dan pembahasan di bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa Pecahnya Partai Nasional Indonesia (PNI) Menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) seperti di bawah ini.

#### 5.1.1 Sebab-Sebab:

- a. perbedaan cara memperjuangkan ideologi para tokoh-tokohnya pada awal berdirinya PNI. Pandangan Hatta menginginkan partai yang harus memisahkan peranan dalam bidang pendidikan bagi kader-kader dan bangsa Indonesia, sedangkan pandangan Soekarno memusatkan perhatiannya pada aksi massa dalam mencapai Indonesia merdeka (mengusir kolonialisme).
- b. perbedaan pendapat antara Sartono dengan Hatta-Syahrir setelah dibubarkannya PNI, pihak yang pro pembubaran (Sartono) mendirikan Partai Indonesia (Partindo) dengan pimpinan Sartono, sedangkan yang menentang (pihak Hatta-Syahrir) mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) pimpinan Hatta.

#### 5.1.2 Proses:

dengan ditangkanya Soekarno dan beberapa tokoh PNI maka oleh Sartono, PNI dibubarkan pada tahun 1931. Pembubaran ini, mengundang perpecahan di dalam tubuh PNI itu sendiri.

#### 5.1.3 Akibat:

- a. Partai Indonesia (Partindo), pihak yang pro pembubaran PNI di bawah pimpinan Sartono;
- b. Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru), pihak yang tidak setuju dengan pembubaran PNI di bawah pimpinan Mohammad Hatta.

## 5.2 Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian (kesimpulan) tersebut di atas, maka pada kesempatan ini dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. bagi mahasiswa calon guru sejarah, agar lebih mendalami dan menguasai materi sejarah, khususnya materi tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia sebagai bekal seorang guru sejarah, sebab penguasaan materi termasuk salah satu kemampuan dasar yang harus dikuasai, dan hal tersebut akan sangat menunjang keberhasilan mengajar;
2. bagi generasi muda yang merupakan generasi penerus perjuangan bangsa, hendaknya lebih giat mempelajari sejarah perjuangan bangsa sehingga dapat bertindak lebih bijaksana dalam meneruskan perjuangan selanjutnya;
3. bagi ahmasmater, hendaknya lebih meningkatkan perbendaharaan buku-buku literatur dalam perpustakaan,khususnya buku-buku literatur tentang sejarah pergerakan nasional Indonesia sehingga mahasiswa dan para dosen tidak kesulitan dalam mencari sumber-sumber sejarah, agar dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian sejarah.



KEPUSTAKAAN

- A.G. Pringgodigdo dkk, 1977, Ensiklopedia Umum, Yayasan Kanisuis , Yogyakarta
- A.H. Nasution, 1977, Sekitar Perang Kemerdekaan I, Disjarah-AD, Angkasa, Bandung
- A.K. Pringgodigdo, 1984, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia , Dian Rakyat, Jakarta
- Anonim, 1991, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Calyo Budi Utomo, 1995, Dinamika Pergerakan Kebangsaan Dari Kebangkitan Hingga Kemerdekaan, IKIP Semarang Press, Semarang
- Deliar Noor, 1990, Mohammad Hatta Biografi Politik, LP3ES, Jakarta
- Depdikbud, 1990, Ensiklopedia Nasional Indonesia Jilid 12, PT Cipta Andi Pustaka, Jakarta
- G. Moedjanto, 1989, Indonesia Abad 20 Jilid I, Kanisius, Yogyakarta
- Gottschalk, Louis 1975, Mengerti Sejarah (terjemahan Nugroho Notosusanto), Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Hardi , 1980, Menarik Pelajaran Dari Sejarah, CV Haji Masagung, Jakarta
- Hasan Shadily, 1984, Ensiklopedia Indonesia, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta
- Ingleson, John 1983, Jalan ke Peningkatan Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1927-1934, LP3ES, Jakarta
- , 1993, Perhimpunan Indonesia dan Pergerakan Kebangsaan, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- M. Hutauruk, 1984, Gelora Nasionalisme Indonesia, Erlangga, Jakarta
- M. Rusli Karim, 1983, Perjalanan Partai Politik di Indonesia Sebuah Potret Pasang Surut, Rajawali, Jakarta
- Mardalis, 1993, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, Bumi Angkasa, Jakarta.
- Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, 1993, Sejarah Nasional Indonesia V , Balai Pustaka, Jakarta.
- Mely G. Tan, 1991, Masalah Perencanaan Penelitian Sosial, dalam Koentjaraningrat (Red), Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta.

- Mohammad Ali, 1982, Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi, Angkasa, Bandung.
- Moh. Nazir, 1985, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Mohammad Sidky Daeng Materu, 1985, Sejarah Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia, Gunung Agung, Jakarta.
- Nugroho Notosusanto, 1964, Hakekat Sedjarah dan Azas-Azas Metode Sedjarah, Pusat Sedjarah ABRI-Dephankam, Jakarta.
- Ricklefs, MC. 1993, Sejarah Indonesia Modern, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sartono Kartodirjo, 1993, Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Slamet Mulyana, 1986, Kesadaran Nasional dari Kolonialisme Sampai Kemerdekaan 2, Inti Idayu Press, Jakarta.
- Sobagijo LN, 1981, Sudiro Perjuangan Tanpa Henti, Gunung Agung, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 1993, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhartono, 1994, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo-Proklamasi 1908-1945, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sukarno, 1989, Indonesia Menggugat, Haji Masagung, Jakarta.
- Sunadi Suryabrata, 1992, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto Tirtoprojo, 1980, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia, PT Pembangunan, Jakarta.
- Sutrisno Hadi, 1989, Metodologi Research Jilid I, Andi Offset Yogyakarta.
- Winarno Surakhmad, 1990, Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metoda Teknik, Tarsito, Bandung.
- W.J.S Poerwadarminta, 1984, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

MATRIK PENELITIAN

Topik	Judul	Jenis dan Sifat Penelitian	Pemasalahan	Sumber Data	Metode Penelitian
Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia	Pecahnya Partai Nasional Indonesia (PNI) Menjadi Partai Indonesia (Partindo) dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru)	1. Jenis Penelitian Historis 2. Sifat Penelitian: Keputakaan	Bagaimanakah perpecahan PNI menjadi Partindo Dan PNI-Baru?	a. Buku pokok 23 buah b. Buku Penunjang 11 buah	1. Penentuan tempat Pengossiv e sampling 2. Pengumpulan data; Dokumenter 3. Analisis data: Metode filosofik dengan teknik: logika komparatif, logika induktif



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER

## UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kalimantan III/24 PO. BOX 198 Jember 68121  
Telp. (0331) 83860, 88261 Fax. (0331) 88261  
E-mail : lib-una@indo.net.id

### SURAT KETERANGAN STUDI LITERATUR

NOMOR : 67 / PT. 32 . H 16 / Q . 1999

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Jember, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : **EMY WAHYUNINGRUM**

NIM : **9402105032**

Prodi/Program : **Pendidikan IPS/ Pendidikan .SEJARAH**

Fakultas : **KIP**

Angkatan : **1994**

Ketimbang mulai bulan **April 1998** sampai bulan **Januari 1999** telah mengadakan studi literatur di Perpustakaan Universitas Jember, dengan judul sebagai berikut :

Tanggal

Tempat

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS SAstra  
Jalan Jawa 19 Jember Telepon (0331) 87188 Kotak Pos 185

Nomor : 387/PT32.FS.1/Q.1999  
Lampiran : -  
Hal : Study literature

05 Maret 1998

Yth.Sdr.Dekan FKIP  
Universitas Jember  
di Jember

Dengan ini pimpinan Fakultas Sastra Universitas Jember  
menerangkan bahwa:

Nama : EMY WAHYUNINGSIH  
N I M : 9402105032  
Prog/Jurusan : Pend. Sejarah/Pend. IPS  
Fakultas : KIP Universitas Jember

Telah melakukan study literature di perpustakaan Fakul-  
tas Sastra Universitas Jember.  
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergu-  
nakan sebagaimana mestinya.

A.n Kabag.Tata Usaha,  
Kasubag Akademik,  
Penanggungjawab Koleksi  
Buku Jurusan,



Drs H a r y o n o  
130 805 618



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

1. Nama : EMY WAHYUNINGRUM  
 2. Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 14 April 1974  
 3. Agama : Islam  
 4. Nama Ayah : H.AH. Sartono  
 5. Nama Ibu : Sri Wahyuti  
 6. Alamat:  
     a. Asal : Jl. Larasati I No: 32 Solo  
     b. Di Jember : Jl. Kalimantan Gg. Kelinci 12 Jember

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Nama Sekolah	Tempat	Tahun Lulus
1	SD N 191 Dawung Tengah	Surakarta	1987
2	SMP N 19 Surakarta	Surakarta	1990
3	SMA N 2 Sukoharjo	Sukoharjo	1993

C. KEGIATAN ORGANISASI

No	Nama Organisasi	Tempat	Tahun
1	UKS SD N 191 Dawung tengah	Surakarta	1987
2	Pramuka SMP N 19 Surakarta	Surakarta	1991
3	OSIS SMA N 2 Sukoharjo	Sukoharjo	1993